

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2010-2019

Imelda Sari¹, Masagus Asaari², Ika Sefty Nurul Hidayah³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi FEB Universitas Yarsi

Email: imeldasari1984@gmail.com

Abstrak : *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan tahun 2010-2019. Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan data menggunakan dokumentasi dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan data skunder yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran yang diperoleh dari situs resmi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Banten. Penelitian ini menggunakan analisis rasio keuangan seperti: rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektivitas dan efesiensi pendapatan asli daerah serta rasio pertumbuhan. Hasil penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Selatan selama periode 2010-2013 mengalami kenaikan secara fluktuatif yaitu dengan persentase berturut-turut selama 4 tahun sebesar 17,60%, 40,39%, 53,28% dan 59,16%. Hal ini menunjukkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan memiliki Kemandirian dalam membiayai daerahnya. Rasio Derajat Desentralisasi diketahui bahwa selama enam tahun periode 2010-2015 belum memiliki persentase nilai yang stabil setiap tahunnya menurut rasio derajat desentralisasi. Namun di tahun 2017 meningkat sebesar 50,53% dan meningkat lagi di tahun 2018 menjadi 54,05%. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan masuk dalam kategori Tinggi sampai Sangat Tinggi. Namun di tahun 2014 terjadi penurunan rata-rata rasio ketergantungan daerah yaitu sebesar 19,49%. (4) Kinerja keuangan pemerintah menurut rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan dapat dikategorikan sangat efektif dengan rata-rata rasio sebesar 117,31% yang mana masih berada dalam skala interval >100%. Rasio Efektivitas PAD sementara itu Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan kinerja keuangan pemerintah menurut rasio efesiensi PAD Kota Tangerang Selatan dapat dikategorikan tidak efisien dengan rata-rata rasio sebesar 159,05% yang mana masih berada dalam skala interval >100. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan dalam satu periode ke periode berikutnya tidak memiliki kenaikan yang stabil, malah cenderung turun secara fluktuatif.*

Kata Kunci: *Kemandirian Keuangan Daerah, Derajat Desentralisasi, Ketergantungan Keuangan Daerah, Efesiensi dan Efektivitas, Pertumbuhan*

Abstract : *This research aims to determine the Financial Performance of the South Tangerang City Government in 2010-2019. This type of research is descriptive with a quantitative approach. Data collection techniques using documentation and literature study. This study uses secondary data, namely the Audit Result Report on the Regional Government Financial Report in the form of a Budget Realization Report obtained from the official website of the Supreme Audit Agency*

of the Republic of Indonesia Representative of the Province of Banten. This study uses financial ratio analysis such as: the ratio of regional financial independence, the ratio of the degree of decentralization, the ratio of regional financial dependence, the ratio of effectiveness and efficiency of local revenue and growth ratio. The result of this research is that the Regional Government Financial Performance of South Tangerang City Government when viewed from the Southern Regional Financial Independence Ratio during the 2010-2013 period experienced a fluctuating increase, namely with the percentages in a row for 4 years of 17.60%, 40.39%, 53.28% and 59.16%. This shows that the South Tangerang City Government has independence in financing its area. It is known that the ratio of degrees of decentralization has not yet had a stable percentage of values each year according to the ratio of degrees of decentralization. However, in 2017 it increased by 50.53% and increased again in 2018 to 54.05%. The Regional Financial Dependency Ratio of the South Tangerang City Government is in the High to Very High category. However, in 2014 there was a decrease in the average regional dependency ratio of 19.49%. (4) The government's financial performance according to the effectiveness ratio of the Regional Original Revenue (PAD) of the South Tangerang City Government can be categorized as very effective with an average ratio of 117,31% which is still in the interval scale >100%. The PAD Effectiveness Ratio while the Regional Original Revenue Efficiency Ratio (PAD) shows the government's financial performance according to the South Tangerang City PAD efficiency ratio can be categorized as inefficient with an average ratio of 159.05% which is still in the interval scale > 100. The Regional Original Income Growth Ratio (PAD) in the South Tangerang City Government in one period to the next did not have a stable increase, in fact it tends to fluctuate fall.

Keywords: *Regional Financial Independence, Degree of Decentralization, Regional Financial Dependence, Efficiency and Effectiveness, Growth*

PENDAHULUAN

Perimbangan keuangan negara antara pusat dan daerah dalam Undang-Undang No.33 tahun 2004 yaitu secara signifikan telah membawa perubahan yang fundamental dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintah baik sistem regulasi, sistem pengawasan dan yang pokok utama yaitu urusan pertanggung jawaban keuangan. Hal ini merupakan wujud pemberian kewenangan yang lebih luas untuk penyelenggaraan keuangan negara dari pemerintah pusat ke pemerintah Kabupaten/Kota (Hakim,2018). Salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah Kabupaten/Kota yaitu tuntutan akuntabilitas sektor publik.

Tuntutan akuntabilitas sektor publik terkait dengan perlunya transparasi dan pemberian informasi keuangan Pemerintah Daerah kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Akuntabilitas publik inilah menjadi kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. dengan adanya tuntutan akuntabilitas tersebut bisa mencerminkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangannya.

Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangannya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan

pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 31 yang mengatur bahwa kepala daerah harus memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan. Laporan Keuangan tersebut setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (Nordiawan, 2010). Melalui laporan keuangan dapat diketahui bagaimana kinerja keuangan suatu Pemerintah Daerah.

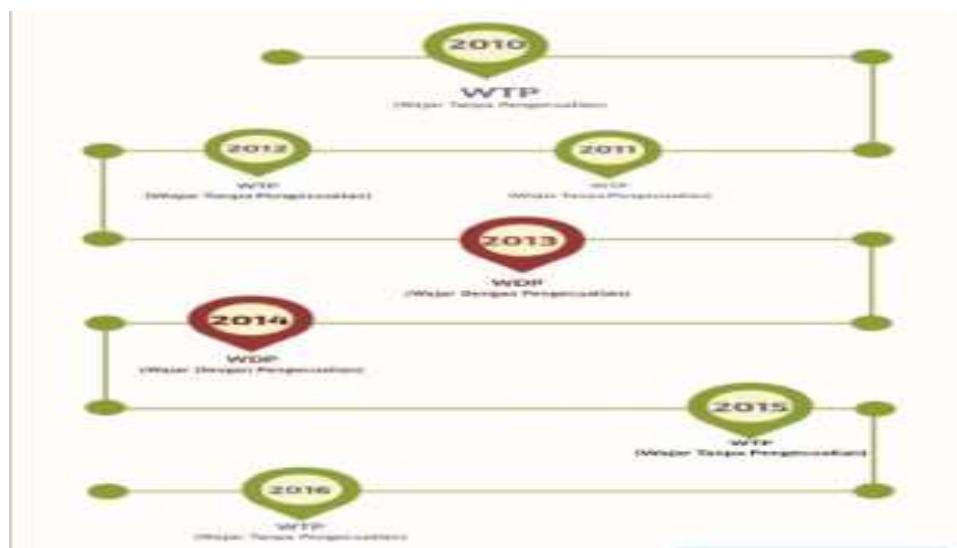
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundangan. Untuk melihat gambaran kinerja keuangan pemerintah daerah yang disajikan dalam laporan keuangan, perlu adanya pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah merupakan bagian dari Pengukuran kinerja sektor publik yang merupakan sebuah sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi memulai alat ukur finansial dan nonfinansial (Mardiasmo, 2018:151).

Salah satu alat yang bisa digunakan untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Penggunaan analisis rasio laporan keuangan secara luas telah banyak digunakan dan diterapkan pada perusahaan yang bersifat komersil. Sedangkan pada lembaga publik, khususnya pada pemerintah daerah penggunaan analisis rasio keuangan masih sangat terbatas. Padahal dari analisis rasio keuangan laporan keuangan pemerintah daerah dapat diketahui bagaimana kinerja pemerintah daerah yang bersangkutan dan juga dapat dijadikan sebagai acuan untuk lebih meningkatkan pendapatan daerah.

Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan membandingkan skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah pada periode berikutnya. Pengukuran kinerja dapat menggunakan analisis rasio keuangan daerah terhadap perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang terdiri dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah, rasio aktivitas, *debt service coverage ratio*, dan rasio pertumbuhan (Halim, 2004:150). Analisis kinerja keuangan ini sangat penting karena dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang, menunjukkan arah pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, memonitor dan mengevaluasi kinerja, membantu mengungkapkan dan memecahkan masalah yang ada.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) merupakan daerah otonomi baru yang lahir berdasarkan Undang-undang No. 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten. Selama tiga tahun pertama setelah pembentukannya, Kota Tangerang Selatan mampu menggali pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari pajak, retribusi, dan lain-lain yang sah. Berdasarkan data yang ada, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tangsel di tahun 2009 sebesar Rp 24,5 miliar. Kemudian pada tahun 2010 naik menjadi Rp 110,4 miliar dan tahun 2011 naik lebih dari 100 persen menjadi Rp 307,2 miliar (Antara Banten, 28 Agustus 2012).

Sejak berpisah dari Kabupaten Tangerang pada tahun 2008, pendapatan asli daerah (PAD) Kota Tangsel naik berlipat ganda setiap tahun. Pada tahun 2010 misalnya, PAD Tangsel hanya Rp 110,4 miliar dengan total APBD Rp663 miliar. Namun pada 2018, target PAD Tangsel melejit menjadi Rp 1,4 triliun dengan total APBD Rp 3,4 triliun. Selain dari PAD, Tangsel juga diproyeksikan mendapatkan pendapatan dari pajak daerah Rp 1,2 triliun, retribusi daerah Rp 80 miliar, pendapatan asli lain-lain Rp 113 miliar, dana perimbangan Rp 746 miliar dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 760 miliar. Total target pendapatan daerah Tangsel 2018 sebesar 2,9 triliun. Tingginya pendapatan daerah menjadi salah satu penilaian Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta untuk memberikan penghargaan bergengsi kepada Pemkot Tangsel tahun 2017 lalu (Tips trend.pojoksatu, 26 November 2018).



Gambar 1. Info Grafis LHP Kota Tangerang Selatan Tahun 2010-2019

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa di tahun 2010 yang merupakan tahun ketiga terbentuknya Kota Tangerang Selatan, Pemerintah Kota Tangsel berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, hal ini berlanjut sampai tahun 2011, di tahun 2013-2014 Pemerintah Kota Tangsel mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), hal ini diakibatkan terdapatnya penyerapan anggaran yang tidak maksimal terhadap aset tetap. Seperti yang diungkapkan oleh Pengamat Keuangan Publik dari Pusat Studi Desentralisasi dan Otonomi Daerah (PSDOD) STIE Ahmad Dahlan Pitri Yandri menilai, diperolehnya predikat WDP menunjukkan bahwa ada penurunan kinerja akuntansi Pemerintah Kota (tangseloke.com/2014/06/03) yang mengindikasikan terjadinya penurunan kinerja keuangan Pemerintah Kota Tangsel pada kurun waktu 2013-2014. Namun, Pemerintah Kota Tangsel terus melakukan perbaikan kinerja pengelolaan keuangan sehingga di tahun 2015-2016 kembali memperoleh opini wajar tanpa pengecualian untuk Laporan Keuangannya. Pemerintah Kota Tangsel berhasil mempertahankan perolehan opini wajar tanpa pengecualian sampai kurun waktu 2017-2019.

Berbagai penelitian mengenai kinerja keuangan daerah telah dilakukan oleh berbagai akademisi antara lain dilakukan oleh Rahmayati (2016) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tahun 2011-2013 masih belum optimal, walaupun dalam pengelolaan PAD sudah efektif dan efisien, tetapi tingkat kemandirian daerah masih sangat rendah. Zuhri (2016) juga melakukan penelitian tentang kinerja keuangan daerah dan hasilnya menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur tahun 2011- 2014 apabila dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah tergolong rendah sekali (rata- rata 2,44% per tahun). Rasio efektifitas PAD pada tahun 2011, 2013 dan 2014 berjalan kurang efektif yang ditunjukkan dengan nilai rasio antara 75-89%. Sedangkan pada tahun 2012 berjalan sangat efektif dengan nilai rasio mencapai 107,3%. Begitupun juga dengan rasio aktivitas dari sisi rasio belanja operasi tergolong baik, sedangkan rasio belanja modal tergolong tidak baik dan pertumbuhan PAD mengalami peningkatan yang tergolong sedang dari tahun ke tahun dengan nilai rata-rata per tahun sebesar 45,22%.

Sedangkan hasil penelitian Siregar (2020) menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Depok tahun 2015-2017 jika dilihat dari rasio derajat desentralisasi fiskal bisa dikatakan cukup. Jika dilihat dari rasio kemandirian kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Depok bisa dikatakan sedang karena peran pemerintah pusat sudah mulai berkurang dalam membiayai kegiatan pemerintah daerah Kota Depok. Kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Depok jika dilihat dari rasio efektivitas PAD bisa dikatakan sangat efektif. Tetapi jika dilihat dari rasio efisiensi PAD dapat dikatakan masih kurang efisien. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Depok jika dilihat dari rasio keserasian masih belum seimbang antara belanja operasi dan belanja modal karena Pemerintah Kota Depok lebih memprioritaskan pengeluaran yang bersifat rutin daripada pembangunan daerah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan periode 2010-2019 melalui Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah, dan Rasio Pertumbuhan.

LANDASAN TEORITIS

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Sudaryo, dkk (2017:9) kinerja keuangan pemerintah daerah adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis keuangan sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili relalitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berkelanjut.

Selain itu menurut Putra (2018:50) pengertian kinerja keuangan pemerintah daerah adalah salah satu bentuk penilaian dengan asas manfaat dan efisiensi dalam penggunaan anggaran keuangan. Dalam organisasi sektor publik, setelah adanya operasional anggaran, langkah selanjutnya adalah pengukuran kinerja untuk menilai prestasi dan akuntabilitas organisasi dan manajemen dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik.

Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah

Analisis rasio keuangan Pemerintah Daerah adalah membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan yang mengetahui posisi keuangan suatu daerah untuk menilai kinerja keuangan dalam suatu periode tertentu. Pada umumnya rasio keuangan bermacam-

macam tergantung kepada kepentingan dan penggunaannya, begitu pula perbedaan jenis analisa juga dapat menimbulkan perbedaan rasio-rasinya (Putra, 2018:59). Menurut Putra (2018:61-68), Rasio keuangan yang bisa digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah adalah rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah serta rasio pertumbuhan. Rasio keuangan ini yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan jenis laporan keuangan Laporan Realisasi Anggaran.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan kemandirian daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah mengandung rasio bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya (Putra 2018:61). Berikut untuk perhitungan atas rasio kemandirian keuangan daerah:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio derajat desentralisasi menurut Putra (2018:62) adalah hasil perhitungan persentase rasio berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah yang didapatkan oleh pemerintah daerah maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi secara mandiri. Berikut untuk perhitungan atas rasio derajat desentralisasi:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah menggunakan dana-dana yang diberikan oleh pemerintah pusat. Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah (Putra, 2018:62). Nilai rasio ketergantungan keuangan daerah, dimana semakin tinggi nilai persentase rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau pemerintah Provinsi (Putra, 2018:62), Berikut untuk perhitungan atas rasio ketergantungan keuangan daerah:

$$\text{Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas pendapatan asli daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang telah direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah itu sendiri. Semakin tinggi rasio efektivitas pendapatan asli daerah maka kemampuan pemerintah daerah pun semakin

baik. Pengertian efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik, sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Semakin besar realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dibanding target penerimaan pendapatan asli daerah maka dapat dikatakan semakin efektif, begitu pula sebaliknya (Putra, 2018:63). Berikut untuk perhitungan atas rasio efektivitas:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\substack{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan} \\ \text{berdasarkan potensi rill daerah}}} \times 100\%$$

Untuk memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektivitas pendapatan asli daerah perlu di sandingkan dengan rasio efisiensi pendapatan asli daerah yang dicapai oleh pemerintah daerah. Rasio efisiensi pendapatan asli daerah ini menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang di keluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan asli daerah dengan realisasi pendapatan asli daerah yang di terima oleh Pemerintah Daerah. Semakin besar pendapatan asli daerah dalam rasio efisiensi pendapatan asli daerah maka kinerja Pemerintah Daerah semakin baik ataupun sebaliknya, jika rasio efisiensi pendapatan asli daerah semakin besar maka kinerja keuangan Pemerintah Daerah semakin besar pula. Untuk itu perlu dihitung secara cermat besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan asli daerah yang diterima tersebut agar terlihat efisien atau tidaknya Putra (2018:63) Khusus dalam bidang keuangan pemerintah daerah, penilaian antara realisasi pengeluaran dan realisasi penerimaan. Berikut untuk perhitungan atas rasio efisiensi:

$$\text{Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya yang dikelurkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Rasio Pertumbuhan

Menurut Putra (2018:67) rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan pendapatan dan pengeluaran keuangan daerah dan meningkatkan keberhasilan atas pendapatan dan pengeluaran keuangan daerah yang telah di capai oleh Pemerintah Daerah dari satu periode ke periode berikutnya. Hal ini cukuplah berat perlu kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat. Diketahui bersama bahwa rasio pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran sebagai bahan evaluasi setiap potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah itu sendiri, hal ini perlu mendapatkan perhatian jauh lebih besar. Salah satu potensi atas komponen penerimaan adalah pendapatan asli daerah atas yang telah di capai daerah. Untuk mengetahui lebih jelas atas tingkat pertumbuhan suatu daerah dalam merealisasikan komponen penerimaan yaitu pendapatan asli daerah (Patarai, 2016:218). Berikut untuk perhitungan atas rasio pertumbuhan:

$$\text{Pertumbuhan} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD (Xn)} - \text{Realisasi Penerimaan PAD (Xn - 1)}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD (Xn - 1)}} \times 100\%$$

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik (Sugiyono, 2019:16-17).

Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan tahun 2010-2019 yang telah audit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan RI dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan dengan jenis laporan yang digunakan yaitu Laporan Realisasi Anggaran.

Variabel Penelitian dan Indikator Pengukuran

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan tahun 2010-2019 yang diukur dengan menggunakan beberapa rasio keuangan berikut ini:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah;

Untuk tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan daerah dapat diukur dengan tingkat persentase yang telah disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel. 1 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian
Sangat rendah	0%-25%
Rendah	>25%-50%
Sedang	>50%-75%
Tinggi (Mandiri)	>75%-100%

2. Rasio Derajat Desentralisasi

Berikut ini adalah skala interval rasio derajat desentralisasi untuk menilai kemampuan keuangan daerah yang telah dicapai oleh daerah, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Skala Interval Rasio Derajat Desentralisasi

Skala Interval Rasio derajat desentralisasi %	Kemampuan Keuangan Daerah
00,00 - 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Cukup
30,01 – 40,00	Sedang
40,01 – 50,00	Baik
>50,01	Sangat Baik

3. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Nilai rasio ketergantungan keuangan daerah, dimana semakin tinggi nilai persentase rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau pemerintah Provinsi (Putra, 2018:62), dalam tabel dibawah ini skala interval sebagai berikut:

Tabel 3. Skala Interval Ketergantungan Keuangan Daerah

Skala Interval Ketergantungan Keuangan Daerah %	Ketergantungan Keuangan Daerah
00,00 - 10,00	Sangat Rendah
10,00 – 20,00	Kurang
20,00 – 30,00	Sedang
30,00 – 40,00	Cukup
40,00 – 50,00	Tinggi
>50,00	Sangat Tinggi

4. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Untuk mengetahui nilai efektivitas pendapatan asli daerah diukur dengan kriteria persentase nilai interpretasi efektivitas pendapatan asli daerah atas kinerja keuangan pemerintah daerah seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. Skala Interval Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Presentase (%)	Kriteria
>100	Sangat Efektif
100	Efektif
90-99	Cukup Efektif
75-89	Kurang Efektif
<75	Tidak Efektif

Sementara itu, untuk kriteria pengukuran rasio efisiensi pendapatan asli daerah dapat dilihat di tabel sebagai berikut:

Tabel 5. Skala Interval Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Skala Interval Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (100%)	Kriteria
<60	Sangat Efisien
60-80	Efisien
80-90	Cukup Efisien
90-100	Kurang Efisien
>100	Tidak Efisien

5. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan Pemda dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya (Putra, 2018:67). Rasio pertumbuhan diukur dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 6. Skala Interval Pertumbuhan

Skala Interval Rasio Pertumbuhan (%)	Kriteria
0-25%	Rendah
25-50%	Sedang
50-100%	Tinggi

Sumber Data, Jenis Data, dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini sumber data di dapatkan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Laporan Keuangan Daerah yang telah di audit dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan dan laporan yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Tangerang Selatan tahun 2010-2019. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah dokumentasi dan studi Pustaka.

Analisis Data

Tahapan Analisis data yang digunakan dalam penelitian diuraikan sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data penelitian berupa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010-2019 yang telah diudit oleh BPK
- b. Menghitung dan mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan tahun 2010-2019 dengan menggunakan rasio keuangan yang digunakan
- c. Menganalisis dan membahas kinerja keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan tahun 2010-2019
- d. Menarik Kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan

Analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan dalam bidang keuangan untuk kurun waktu 2010-2019. Rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan pada penelitian ini adalah: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah dan Rasio Pertumbuhan. Data yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Banten. Dari data tersebut akan dianalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan. Adapun hasil dari perhitungan analisis rasio tersebut adalah:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Hasil perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan 2010-2019 ditunjukkan pada Tabel 7.

Tabel 7. Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010-2019

Tahun Anggaran	PAD	Pendapatan Transfer	RKKD (%)	Keterangan
2010	131,503,971,623	747,293,499,553	17.60	Sangat Rendah
2011	420,663,048,857	1,041,507,956,423	40.39	Rendah

Tahun Anggaran	PAD	Pendapatan Transfer	RKKD (%)	Keterangan
2012	576,304,771,005	1,081,754,272,676	53.28	Sedang
2013	728,965,301,483	1,232,283,635,199	59.16	Sedang
2014	1,023,817,429,319	1,244,681,795,209	82.26	Tinggi (Mandiri)
2015	1,228,393,889,612	1,374,018,335,883	89.40	Tinggi (Mandiri)
2016	1,346,240,155,744	1,317,918,608,817	102.15	Tinggi (Mandiri)
2017	1,622,004,639,363	1,378,274,161,770	117.68	Tinggi (Mandiri)
2018	1,621,710,653,274	1,499,124,050,177	108.18	Tinggi (Mandiri)
2019	1,817,505,710,180	1,535,640,267,155	118.35	Tinggi (Mandiri)

Sumber: BPK RI PERWAKILAN PROVINSI BANTEN (Data Diolah), 2020

Keterangan (%):

Sangat Rendah : 0-25%

Rendah : >25%-50%

Sedang : >50%-75%

Tinggi (Mandiri) : > 75%-100%

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh peneliti pada tabel 7. di atas dapat dilihat bahwa persentase nilai rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan selama periode 2010-2013 mengalami kenaikan secara fluktuatif yaitu dengan persentase berturut-turut selama 4 tahun sebesar 17,60%, 40,39%, 53,28% dan 59,16%. Hal ini menunjukkan kenaikan setiap tahunnya. Namun kenaikan ini belum bisa mengkategorikan tingkat kemandirian keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan pada level mandiri secara keuangan. Artinya dalam kurun waktu 2010-2013 kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan masih dikategorikan rendah dan terdapat pola hubungan instruktif dimana masih terdapat peran pemerintah masih dominan daripada kemandirian daerah Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan dalam membiayai keuangan daerahnya. tidak ada persentase rata-rata rasio yang menunjukkan nilai yang stabil atau kenaikan setiap tahunnya.

Pada kurun waktu 2014-2019 terjadi hal yang cukup menggembirakan, dapat dilihat pada tabel diatas bahwa terjadi kenaikan rata-rata kemandirian keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan yang cukup signifikan dan stabil di periode tersebut. Walaupun pada tahun 2018 terjadi sedikit penurunan sebesar 108,18% namun penurunannya masih masuk kedalam kriteria tinggi/mandiri. Hal ini membuktikan bahwa dengan adanya peningkatan jumlah PAD setiap tahunnya akan membuat Pemerintah Daerah menjadi mandiri secara keuangan. Hal ini tentunya harus dipertahankan setiap tahunnya oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan lebih gencar lagi menggali potensi PAD yang ada di Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

2. Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Hasil dari perhitungan rasio derajat desentralisasi dapat dilihat pada tabel 8. Berikut ini:

Tabel 8. Rasio Derajat Desentralisasi Pemerintah Daerah Kota
Tangerang Selatan Tahun 2010-2019

Tahun Anggaran	Realisasi PAD	Total Penerimaan Daerah	RDD (%)	Keterangan
2010	131,503,971,623	918,197,436,176	14.32	Kurang
2011	420,663,048,857	1,494,990,970,280	28.14	Cukup
2012	576,304,771,005	1,701,879,043,682	33.86	Sedang
2013	728,965,301,483	2,019,535,444,396	36.10	Sedang
2014	1,023,817,429,319	6,387,396,698,105	16.03	Kurang
2015	1,228,393,889,612	2,602,412,225,495	47.20	Baik
2016	1,346,240,155,744	2,664,158,764,561	50.53	Sangat Baik
2017	1,622,004,639,363	3,000,278,801,133	54.06	Sangat Baik
2018	1,621,710,653,274	3,211,105,498,451	50.50	Sangat Baik
2019	1,817,505,710,180	3,444,240,657,335	52.77	Sangat Baik

Sumber: BPK RI PERWAKILAN PROVINSI BANTEN (Data Diolah), 2020

Keterangan (%):

Sangat Kurang : 00,00-10,00

Kurang : 10,00-20,00

Cukup : 20,00-30,00

Sedang : 30,00-40,00

Baik : 40,00-50,00

Sangat Baik : >50,01

Dapat dilihat pada tabel 8. diatas bahwa Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan selama enam tahun periode 2010-2015 belum memiliki persentase nilai yang stabil setiap tahunnya menurut rasio derajat desentralisasi . Untuk rata-rata rasio derajat desentralisasi dalam kurun waktu 6 (enam) tahun pertama sebenarnya mengalami kenaikan setiap tahunnya. Rata-rata terendah terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 14,32%, angka ini masuk kedalam kriteria kurangnya derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Kota Tangerang Selatan baru terbentuk pada 3 (tiga) tahun pertama, sehingga diasumsikan pemerintah belum bisa mengoptimalkan potensi PAD yang dimilikinya.

Selanjutnya dalam kurun waktu periode 2016-2019, Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah mampu memperbaiki diri. Hal ini terlihat dengan meningkatnya rata-rata derajat desentralisasi di tahun 2017 sebesar 50,53% dan meningkat lagi di tahun 2018 menjadi 54,05%. Kenaikan rata-rata derajat desentralisasi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah siap menjalankan otonomi daerah yang memegang prinsip desentralisasi.

3. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (KetKD) dapat dihitung dengan membandingkan jumlah pendapatan transfer yang di terima oleh penerimaan daerah itu sendiri dengan total penerimaan daerah (Putra, 2018:62), perhitungan atas rasio ketergantungan keuangan daerah Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 9. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010-2019

Tahun Anggaran	Pendapatan Transfer	Total Penerimaan Daerah	RKKD (%)	Keterangan
2010	747,293,499,553	918,197,436,176	81.39	Sangat Tinggi
2011	1,041,507,956,423	1,494,990,970,280	69.67	Sangat Tinggi
2012	1,081,754,272,676	1,701,879,043,682	63.56	Sangat Tinggi
2013	1,232,283,635,199	2,019,535,444,396	61.02	Sangat Tinggi
2014	1,244,681,795,209	6,387,396,698,105	19.49	Kurang
2015	1,374,018,335,883	2,602,412,225,495	52.80	Sangat Tinggi
2016	1,317,918,608,817	2,664,158,764,561	49.47	Tinggi
2017	1,378,274,161,770	3,000,278,801,133	45.94	Tinggi
2018	1,499,124,050,177	3,211,105,498,451	46.69	Tinggi
2019	1,535,640,267,155	3,444,240,657,335	44.59	Tinggi

Sumber: BPK RI PERWAKILAN PROVINSI BANTEN (Data Diolah), 2020

Keterangan (%):

Sangat Kurang	: 00,00-10,00
Kurang	: 10,00-20,00
Cukup	: 20,00-30,00
Sedang	: 30,00-40,00
Tinggi	: 40,00-50,00
Sangat Tinggi	: >50,01

Berdasarkan hasil perhitungan rasio dalam tabel 9. diatas bahwa kinerja keuangan pemerintah menurut rasio ketergantungan keuangan daerah Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan masuk dalam kategori Tinggi sampai Sangat Tinggi. Namun di tahun 2014 terjadi penurunan rata-rata rasio ketergantungan daerah yaitu sebesar 19,49%. Hal ini dikarenakan pada tahun ini jumlah total penerimaan daerah sangat tinggi dalam waktu kurun waktu 2010-2019 yaitu sebesar Rp 6.387.396.698.105 artinya pada tahun 2014 total penerimaan daerah lebih dominan dibandingkan pendapatan transfer. Hal ini mungkin juga disebabkan karena di tahun 2014 ini Pemerintah Kota Tangsel mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK dikarenakan tidak amksimalnya penyerapan anggaran terhadap asset tetap.

4. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan, di bandingkan dengan target yang di tetapkan berdasarkan potensi rill daerah (Putra, 2018:63). Hasil dari perhitungan rasio efektivitas pendapatan asli daerah Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan tahun 2010-2019 dapat dilihat pada tabel 9. di bawah ini:

Tabel 9. Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Daerah Kota
Tangerang Selatan Tahun 2010-2019

Tahun Anggaran	Realisasi PAD	PAD yang Dianggarkan	Rata-rata (%)	Keterangan
2010	131,503,971,623	110366185000.00	119.15	Sangat Efektif
2011	420,663,048,857	307176100000.00	136.95	Sangat Efektif
2012	576,304,771,005	443737453353.00	129.88	Sangat Efektif
2013	728,965,301,483	600851230000.00	121.32	Sangat Efektif
2014	1,023,817,429,319	855955379209.00	119.61	Sangat Efektif
2015	1,228,393,889,612	1120064009792.00	109.67	Sangat Efektif
2016	1,346,240,155,744	1243705400000.00	108.24	Sangat Efektif
2017	1,622,004,639,363	1448309462781.00	111.99	Sangat Efektif
2018	1,621,710,653,274	1494934264514.00	108.48	Sangat Efektif
2019	1,817,505,710,180	1686708001000.00	107.75	Sangat Efektif

Sumber: BPK RI PERWAKILAN PROVINSI BANTEN (Data Diolah), 2020

Keterangan (%):

Sangat Efektif	: >100
Efektif	: 100
Cukup Efektif	: 90-99
Kurang	: 75-89
Tidak Efektif	: <75

Berdasarkan hasil perhitungan rasio dalam tabel 9. bahwa kinerja keuangan pemerintah menurut rasio efektivitas PAD Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan dapat dikategorikan sangat efektif dengan rata-rata rasio sebesar 117,31% yang mana masih berada dalam skala interval >100%. Hal ini disebabkan karena penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah melebihi dari yang dianggarkan sebelumnya. Hal ini merupakan wujud keberhasilan pemerintah daerah telah melakukan perhitungan dengan cermat biaya yang dikeluarkan untuk merealisasi seluruh pendapatan yang diterima. Selain itu dapat dikatakan Pemda memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan sebelumnya.

Namun disisi lain, Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan tetap harus mempertahankan PAD yang ada atau bahkan meningkatkan kembali PAD yang telah ada. Pemerintah daerah harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pibiayaannya, hal ini memerlukan kreatifitas dari aparat pelaksanaan keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pibiayaan yang baru melalui program kerjasama pibiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD. Seperti pendirian dan perluasan sektor potensial.

Selain rasio efektifitas pendapatan asli daerah, rasio ini perlu disandingkan dengan rasio efisiensi pendapatan asli daerah. Rasio efisiensi pendapatan asli daerah adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang di keluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk memperoleh pendapatan asli daerah dengan realisasi pendapatan asli daerah yang di terima oleh Pemerintah Daerah (Putra, 2018:63). Hasil dari perhitungan yang terlah di lakukan oleh peneliti atas rata-rata rasio efektivitas pendapatan asli daerah

Kota Tangerang Selatan selama sepuluh tahun periode 2010-2019 dapat dilihat pada tabel 10 sebagai berikut:

Tabel 10. Rasio Efisiensi PAD Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010-2019

Tahun Anggaran	Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD			Realisasi PAD	Rata-rata (%)	Keterangan
	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Jumlah			
2010	350,532,572,438	134,689,759,605	485,222,332,043	131,503,971,623	368.98	Tidak Efisien
2011	459,246,925,972	302,295,625,451	761,542,551,423	420,663,048,857	181.03	Tidak Efisien
2012	589,700,642,561	434,834,542,980	1,024,535,185,541	576,304,771,005	177.78	Tidak Efisien
2013	662,350,022,040	540,642,826,410	1,202,992,848,450	728,965,301,483	165.03	Tidak Efisien
2014	736,443,916	601,077,705,839	601,814,149,755	1,023,817,429,319	58.78	Sangat Efisien
2015	856,994,996,201	678,880,851,512	1,535,875,847,713	1,228,393,889,612	125.03	Tidak Efisien
2016	963,992,579,573	801,613,778,865	1,765,606,358,438	1,346,240,155,744	131.15	Tidak Efisien
2017	954,504,935,751	973,020,546,265	1,927,525,482,016	1,622,004,639,363	118.84	Tidak Efisien
2018	1,195,785,160,636	962,021,406,581	2,157,806,567,217	1,621,710,653,274	133.06	Tidak Efisien
2019	1,228,043,126,348	1,149,009,981,332	2,377,053,107,680	1,817,505,710,180	130.79	Tidak Efisien

Sumber: BPK RI PERWAKILAN PROVINSI BANTEN (Data Diolah), 2020

Keterangan (%):

Sangat Efisien : <60

Efisien : 60-80

Cukup Efisien : 80-90

Kurang Efisien : 90-100

Tidak Efisien : >100

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi PAD dalam tabel 10. diatas bahwa kinerja keuangan pemerintah menurut rasio efisiensi PAD Kota Tangerang Selatan dapat dikategorikan tidak efisien dengan rata-rata rasio sebesar 159,05% yang mana masih berada dalam skala interval >100. Hal ini disebabkan karena realisasi belanja daerah lebih besar dari pada realisasi pendapatannya sehingga dikategorikan kurang efisien, yang berarti total belanjanya melebihi total pendapatan daerah karena belum dapat menekan jumlah belanja daerahnya. Untuk kedepannya diharapkan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan dapat meminimalisir jumlah belanjanya dengan disesuaikan pendapatannya dan pengupayakan untuk meningkatkan pendapatannya dengan cara terus mengoptimalkan perencanaan-perencanaan yang telah dibuat agar semua rencana tersusun dengan baik dan tidak menjadi penghambat untuk proses kinerja pemerintah daerah kedepannya. Serta Pemerintah Daerah perlu menggali potensi-potensi sumber pendapatan yang dimiliki. Sehingga nantinya dapat meningkatkan efisiensi belanja di daerah.

5. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan Pemda dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah di capai dari periode ke periode berikutnya (Putra, 2018:67). Hasil dari perhitungan rata-rata rasio pertumbuhan Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel 11.

Tabel 11. Rasio Pertumbuhan Pemerintah Daerah Kota
Tangerang Selatan Tahun 2010-2019

Tahun Anggaran	PAD Saat ini	PAD tahun sebelumnya	PAD Saat ini - PAD sebelumnya	Rata-rata (%)	Ket
2010	131,503,971,623	22,391,525,452	109,112,446,171	487.29	Tinggi
2011	420,663,048,857	131,503,971,623	289,159,077,234	219.89	Tinggi
2012	576,304,771,005	420,663,048,857	155,641,722,148	37.00	Sedang
2013	728,965,301,483	576,304,771,005	152,660,530,478	26.49	Sedang
2014	1,023,817,429,319	728,965,301,483	294,852,127,836	40.45	Sedang
2015	1,228,393,889,612	1,023,817,429,319	204,576,460,293	19.98	Rendah
2016	1,346,240,155,744	1,228,393,889,612	117,846,266,132	9.59	Rendah
2017	1,622,004,639,363	1,346,240,155,744	275,764,483,619	20.48	Rendah
2018	1,621,710,653,274	1,622,004,639,363	-293,986,089	-0.02	Rendah
2019	1,817,505,710,180	1,621,710,653,274	195,795,056,906	12.07	Rendah

Sumber: BPK RI PERWAKILAN PROVINSI BANTEN (Data Diolah), 2020

Keterangan (%):

Rendah : 0-25

Sedang : 25-50

Tinggi : 50-100

Berdasarkan hasil perhitungan rasio dalam tabel 11. diatas bahwa kinerja keuangan pemerintah menurut rasio pertumbuhan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan dalam satu periode ke periode berikutnya tidak memiliki kenaikan yang stabil, malah cenderung turun secara fluktuatif. Perlu adanya optimalisasi sektor PAD di Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah. Dimana sektor terbesar penyumbang PAD adalah pajak daerah dan retribusi daerah. inilah yang perlu di amati secara keseluruhan agar terciptanya pertumbuhan yang stabil atau meningkat setiap tahunnya. Hal ini tidak luput dari proses kerjasama yang baik dari pemerintah maupun dari masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik simpulan sebagai berikut: (1) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Selatan selama periode 2010-2013 mengalami kenaikan secara fluktuatif yaitu dengan persentase berturut-turut selama 4 tahun sebesar 17,60%, 40,39%, 53,28% dan 59,16%. Namun masih terdapat peran dominan pemerintah pusat. Pada kurun waktu 2014-2019 barulah Pemerintah Kota Tnagerang Selatan memiliki Kemandirian dalam membiayai daerahnya. (2) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi diketahui bahwa selama enam tahun periode 2010-2015 belum memiliki persentase nilai yang stabil setiap tahunnya menurut rasio derajat desentralisasi. Untuk rata-rata rasio derajat desentralisasi dalam kurun waktu 6 (enam) tahun pertama sebenarnya mengalami kenaikan setiap tahunnya. Selanjutnya dalam kurun

waktu periode 2016-2019, Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah mampu memperbaiki diri. Hal ini terlihat dengan meningkatnya rata-rata derajat desentralisasi di tahun 2017 sebesar 50,53% dan meningkat lagi di tahun 2018 menjadi 54,05%. Kenaikan rata-rata derajat desentralisasi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah siap menjalankan otonomi daerah yang memegang prinsip desentralisasi. (3) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah diatas Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan masuk dalam kategori Tinggi sampai Sangat Tinggi. Namun di tahun 2014 terjadi penurunan rata-rata rasio ketergantungan daerah yaitu sebesar 19,49%. (4) Kinerja keuangan pemerintah menurut rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan dapat dikategorikan sangat efektif dengan rata-rata rasio sebesar 117,31% yang mana masih berada dalam skala interval $>100\%$. Rasio Efektivitas PAD sementara itu Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan kinerja keuangan pemerintah menurut rasio efisiensi PAD Kota Tangerang Selatan dapat dikategorikan tidak efisien dengan rata-rata rasio sebesar 159,05% yang mana masih berada dalam skala interval >100 . (5) Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan dalam satu periode ke periode berikutnya tidak memiliki kenaikan yang stabil, malah cenderung turun secara fluktuatif.

Saran

Pemerintah Daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatan yang telah ada. Inisiatif dan kemauan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan PAD. Peningkatan PAD dapat dilakukan Pemerintah Daerah dengan cara melaksanakan secara optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam pemungutan PAD oleh aparatur daerah. Selain itu Pemerintah Daerah harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya, dan hal ini memerlukan kreativitas dari aparat pelaksanaan keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial. Selain itu Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengurangi ketergantungannya terhadap bantuan dari pemerintah pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul, dkk. 2012, “*Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*”. Salemba Empat. Jakarta.
- Mardiasmo. 2018. “*Akuntansi Sektor Publik*”. Yogyakarta. Andi Yogyakarta
- Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertanti. 2010. “*Akuntansi Sektor Publik*”. Salemba Empat. Jakarta.
- Patarai, Muhammad Idris, 2016, “*Perencanaan Pembangunan Daerah*”, Makassar. De La Macca.
- Putra, Windhyu. 2018. “*Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*”. Depok. Rajawali Press.
- Sugiyono. 2019. “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”. Bandung, Alfabeta.
- Siregar, D, Oktrivina Amelia dan Mariana, Ira. 2016. “*Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan (Studi Kasus : Pemerintahan Kota Depok-Jawa Barat)*”. *Jurnal Image*, Volume 9 Number 1.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, “*Tentang Keuangan Negara*”.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, “*Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*”.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008, “*Tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten*”.
Zuhri, Muhammad dan Soleh, Ahmad. 2016. “*Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten Kaur*”.
Ekombis Review.